

PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS *VALUE FOR MONEY* PADA PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Value For Money-Based Financial Performance Measurement At The North Toraja Regency Government

Medyoto Tikupasang¹⁾, Haliah²⁾, Andi Kusumawati³⁾

Email: medyototikupasang@gmail.com¹⁾, haliah@fe.unhas.ac.id²⁾, andiuma88@gmail.com³⁾

Magister Akuntansi, Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar Sulawesi Selatan 90245

Abstract

Financial performance is one of the most important issues in public sector organizations. Demanding transparency and accountability and supported by technological developments, several public sector organizations/institutions have published their performance reports, including their budget realization reports through their institutional websites. This study aims to determine the ability of the Regional Government of North Toraja Regency in 3 Fields of Government in regulating their budgets. Measurement will be done using Value For Money. This study used a descriptive qualitative approach. This research will measure the performance of the program on the activities carried out by collecting and presenting data on the 2021 North Toraja Regency Government APBD Realization Report in three areas of government, namely the Environment, the Culture and Tourism Office, and Transportation. The analysis will be carried out using the Value For Money method. Data collection is carried out by visiting the website of the Regional Government of North Toraja Regency and downloading the North Toraja Regency Regional Government APBD Realization Report from the site. The results of performance measurements in the activity program at the North Toraja Regency Government in the Field of Environmental Governance, the Culture and Tourism Office, and Transportation in 2021 which are measured using Value For Money can be said to be quite good in terms of economy and efficiency, but still need to improve performance in terms of effectiveness.

Keywords: Performance, Value For Money, Economy, Efficiency, and Effectiveness

Abstrak

Kinerja keuangan adalah salah satu isu yang sangat penting pada organisasi sektor publik. Tuntutan untuk transparan dan akuntabel serta didukung perkembangan teknologi, beberapa organisasi/institusi sektor publik telah mempublikasikan laporan kinerja mereka, termasuk laporan realisasi anggaran mereka melalui *website* intitusimereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara pada 3 Bidang Pemerintahan dalam mengatur anggran mereka. Pengukuran akan dilakukan dengan menggunakan *Value For Money*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan mengukur kinerja program atas kegiatan yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 pada tiga bidang pemerintahan, yaitu Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Perhubungan. Analisis akan dilakukan mengan menggunakan metode *Value For Money*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunjungi situs *website* Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dan mengunduh Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dari situs tersebut. Hasil pengukuran kinerja pada program kegiatan di Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Bidang Pemerintahan Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Perhubungan di tahun 2021 yang pengukurannya menggunakan *Value For Money* boleh dikatakan cukup baik darisegi ekonomi dan efisien, namun masih perlu meningkatkan kinerja dari segi efektivitas.

Kata Kunci : Kinerja, *Value For Money*, Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas

PENDAHULUAN

Institusi pemerintahan merupakan bentuk organisasi sektor publik yang tujuannya menyalurkan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan, jasa pelayanan publik, transportasi, kepastian hukum, keamanan, dan lain sebagainya. Kinerja keuangan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam organisasi sektor publik. Tuntutan untuk transparan dan akuntabel serta didukung perkembangan teknologi, beberapa organisasi/institusi sektor publik sudah mempublikasikan laporan kinerja mereka, termasuk laporan realisasi anggaran mereka melalui *website* intitusi mereka. Dengan adanya publikasi informasi terkait masalah keuangan melalui *website* ini memudahkan pihak manapun bisa memperoleh informasi terkait keuangan pemerintah, tidak hanya dari pemerintahan itu sendiri, namun juga pihak akademisi bahkan masyarakat secara umum. Akuntabilitas publik sangat berguna dalam mengukur kinerja suatu instansi pada sektor publik.

Pengukuran terhadap kinerja dianggap penting untuk menilai akuntabilitas pada suatu organisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Tidak melihat bagaimana uang rakyat dibelanjakan, namun kita ingin melihat bagaimana dana tersebut telah dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Ada dua metode yang sering digunakan dalam melakukan pengukuran kinerja, yaitu *Value For Money* dan *Balance Score Card*. Ekonomi, efisiensi, dan efektivitas merupakan tiga elemen dari *Value for Money*. Sedangkan pada metode *Balance Score Card* ada empat elemen yang dinilai, yaitu *finance, consumer, internal, dan growth and learn*.

Realisasi atas APBD suatu kabupaten atau kota yang tidak maksimal akan merugikan masyarakat karena akan berpengaruh terhadap pelayanan terhadap masyarakat yang juga tidak maksimal. Dilansir dari nasional.kontan.co.id, Kementerian Keuangan melaporakn bahwa realisasi APBD 2021 mengalami penurunan sebesar 2,48% dibandingkan APBD 2020. Ada empat alasan rendahnya serapan anggaran APBD 2021. Pertama, kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal dalam proses lelang dan administrasi. Kedua, penagihan kontrak atas barang dan jasa atau proyek fisik yang dilakukan di akhir masa pengerjaan yang realisasi dan pencatatannya dilakukan pada akhir tahun. Ketiga, kehati-hatian dalam melaksakan pengeluaran menunggu arahan pejabat baru sebagai akibat dari pelaksanaan PILKADA. Keempat, adanya rigiditas perubahan anggaran yang memerlukan persetujuan legislatif.

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap realisasi pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik menyebabkan penurunan jumlah devisa pariwisata serta pendapatan hotel dan restoran.

Beberapa penelitian telah dilakukan di beberapa instansi sektor publik. Rumagit *et al.*, (2022) melakukan penelitian pada Dinas Pariwisata Kota Manado yang menunjukkan dari segi ekonomis telah mampu melakukan penghematan, menggunakan sumber daya secara efisien, dan telah menjalankan program untuk mencapai tujuan sefara efektif padatahun 2020.

Kemudian Ambat *et al.*, (2022) melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan dari segi rasio ekonomi kinerja program kegiatan yang dilaksanakan telah ekonomis, rasio efisiensi atas program kegiatan yang telah dilaksanakan telah efisien, dan untuk rasio efektivitas atas program kegiatan yang dilaksanakan berjalan efektif pada tahun 2021.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang atau jasa serta pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Berikut adalah karakteristik organisasi sektor publik menurut Biduri (2018).

- a. Tujuan organisasi memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Sumber pendanaan berasal dari pajak dan retribusi, laba perusahaan milik negara, *charging for services*, pinjaman pemerintahan, serta pendapatan yang sah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan.
- c. Manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena uang yang digunakan berasal dari masyarakat.
- d. Struktur organisasi bersifat hirarkis, birokratis, dan kaku.
- e. Rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat. Pemangku kepentingan eksternal adalah masyarakat pengguna jasa publik. Sedangkan dari internal adalah lembaga negara, manajer publik, kelompok politik, dan sebgainya.
- f. Sistem akuntansi sektor publik lebih banyak menggunakan sistem akuntansi *cash basis*

2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklaifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut (Arif, *et. al* 2002)

3. Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah keberhasilan personel, tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan (Riadi, 2020).

Sistem pengukuran kinerja memiliki dua fungsi utama, yaitu untuk memberikan informasi yang memungkinkan peningkatan kinerja organisasi di sektor publik, dan untuk mempertanggungjawabkan dana yang digunakan. Pengukuran kinerja adalah alat yang menggambarkan perbaikan organisasi karena tidak mungkin suatu organisasi dapat bertindak secara efektif tanpa diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja akhir-akhir ini menjadi teknik pengukuran dan peningkatan manajerial keuangan yang penting terhadap kinerja pemerintah.

4. Value For Money

Value for Money adalah model pengukuran kinerja *public sector* yang mendasar terhadap tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2015).

- a. Perolehan input berkualitas tinggi serta jumlah dengan harga yang rendah disebut sebagai ekonomi. Input yang utama dalam bentuk uang diubah menjadi input sekunder seperti tenaga kerja, material, infrastruktur, dan barang modal, yang digunakan untuk kegiatan operasional. Sejauh mana organisasi dapat mengurangi jumlah sumber daya yang diperlukan untuk menghindari pemborosan dan tidak efektif disebut sebagai ekonomi.
- b. Efisiensi adalah metode untuk mencapai hasil maksimal dengan menggunakan sumber daya sesedikit mungkin. Mengurangi penggunaan sumber daya untuk menghasilkan produk tertentu adalah tentang efisiensi. Untuk mencapai output yang diinginkan, efisiensi juga berarti mengurangi pemborosan sumber daya input seperti bahan fisik, energi, dan waktu.
- c. Efektivitas mengacu pada sejauh mana hasil program memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Istilah "efektivitas" mengacu pada perbandingan antara keluaran dan hasil. Semakin banyak output yang berkontribusi, semakin efektif organisasi menjalankan kegiatan tersebut.

Tiga elemen yang tercantum di atas adalah aspek terpenting dari *Value for Money*. Namun, beberapa orang percaya bahwa ketiga persyaratan itu tidak cukup. Ada dua unsur lain yang harus disertakan, yaitu keadilan dan pemerataan/ kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa dana masyarakat tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir tangan, tetapi harus didistribusikan secara merata.

Tujuan menggunakan *Value for Money* adalah untuk menghemat uang melalui pengadaan dan alokasi sumber daya yang cermat. Efisiensi mengacu pada seberapa baik sumber daya digunakan. Efektivitas diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini akan mengukur kinerja program atas kegiatan yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 pada tiga bidang pemerintahan, yaitu Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Perhubungan. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode *Value For Money*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengunjungi situs website Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dan mengunduh Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dari situs tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran *Value for Money* dihitung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 pada tiga bidang pemerintahan, yaitu Bidang Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Perhubungan. Berikut target serta realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di tiga bidang pemerintahan. Berikut rekapitulasi Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Tabel 1
Rekapitulasi Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

Bidang Pemerintahan	Pendapatan Daerah		Belanja Daerah	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Lingkungan Hidup	900,000,000	1,081,965,700	8,757,570,279	8,649,549,486
Dinas Kebudayaan & Pariwisata	2,300,000,000	854,637,000	13,012,612,525	12,781,567,158
Perhubungan	832,000,000	568,580,300	4,497,483,780	4,424,333,742

Sumber : Lapoan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Untuk Tahunyang Berakhir sampai 31 Desember 2021

Tabel 2
Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Dengan Value For Money

Bidang Pemerintahan	Value For Money	Penghitungan	Tahun 2021	Standar Rasio
Lingkungan Hidup	Ekonomis	8,649,549,486	98.77%	<100
		8,757,570,279		
	Efisien	8,649,549,486	799.43%	>100
Dinas Kebudayaan & Pariwisata	Ekonomis	1,081,965,700	120.22%	>100
		900,000,000		
	Efektif	12,781,567,158	98.22%	<100
Perhubungan	Ekonomis	13,012,612,525	1495.56%	>100
		12,781,567,158		
	Efisien	854,637,000	37.16%	>100
Perhubungan	Ekonomis	4,424,333,742	98.37%	<100
		4,497,483,780		
	Efisien	4,424,333,742	778.14%	>100
Perhubungan	Ekonomis	568,580,300	68.34%	>100
		568,580,300		
	Efektif	832,000,000		

Dalam pengukuran kinerja keuangan, dikatakan ekonomis apabila diperoleh rasio kurang dari 100%. Jika rasionya adalah sama dengan 100% maka kinerja dikatakan ekonomis berimbang. Sedangkan rasio yang lebih besar dari 100% maka kinerja dikatakan tidak ekonomis. Jika kita membandingkan hasil pengukuran kinerja ekonomi pada Tabel 2 dengan kriteria ekonomi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada Bidang Pemerintahan Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Perhubungan mendapatkan nilai di bawah 100% yang berarti bahwa ketiga bidang tersebut telah berhasil melakukan penghematan dalam penggunaan anggarannya. Pada Bidang Pemerintahan Lingkungan Hidup total belanja pada tahun 2021 sebesar Rp8.649.549.486 dari anggaran yang disiapkan sebesar Rp8.757.570.279 atau sebesar 98,77% dari total anggaran. Demikian juga dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membelanjakan 98,22% dana dari total anggaran dan Bidang Pemerintahan Perhubungan membelanjakan 98,37% dari total anggaran.

Kinerja keuangan dikatakan efisien jika rasio yang diperoleh lebih dari 100%. Jika rasio yang diperoleh adalah 100% maka kinerja dikatakan efisien berimbang. Sedangkan, rasio yang kurang dari 100% maka kinerja dikatakan tidak efisien. Jika kita membandingkan hasil pengukuran kinerja efisiensi pada Tabel 2 dengan kriteria efisiensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada Bidang Pemerintahan Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Perhubungan mendapatkan nilai di atas 100% yang berarti bahwa ketiga bidang tersebut telah berhasil menjalankan programnya secara efisien.

Kinerja keuangan dikatakan efektif jika rasio yang diperoleh lebih dari 100%. Jika rasio yang diperoleh adalah 100% maka kinerja dikatakan efektif berimbang. Sedangkan, rasio yang kurang dari 100% maka kinerja dianggap dilaksanakan tidak efektif. Jika kita membandingkan hasil pengukuran kinerja efektivitas pada Tabel 2 dengan kriteria efektivitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada Bidang Pemerintahan Lingkungan Hidup mendapat nilai di atas 100% yang berarti bahwa Bidang Pemerintahan Lingkungan Hidup

telah merealisasikan pendapatannya lebih besar dari anggarannya sudah berjalan secara efektif. Sedangkan Pemerintahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Perhubungan mendapat nilai di bawah 100%, yaitu masing-masing 37,16% dan 68,34%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bidang pemerintahan ini belum merealisasikan anggaran pendapatannya belum secara efektif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dimana dari segi rasio ekonomi kinerja program kegiatan yang dilaksanakan telah ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Bidang Pemerintahan Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Perhubungan mampu mengelola anggaran secara tepat dan dapat meminimalisir penggunaan anggaran secara berlebihan sehingga terjadi penghematan.

Berdasarkan hasil rasio efisiensi kinerja program kegiatan yang dilaksanakan telah efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Bidang Pemerintahan Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Perhubungan mampu mengelola anggaran pendapatan dan belanja dengan baik.

Sedangkan untuk hasil rasio efektivitas program kegiatan yang sudah dilaksanakan Bidang Pemerintahan Lingkungan Hidup telah berjalan dengan efektif. Sedangkan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Perhubungan menunjukkan belum efisien dalam menjalankan program kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan menggunakan *Value For Money* untuk mengukur kinerja pada program kegiatan di Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Bidang Pemerintahan Lingkungan Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Perhubungan pada tahun 2021 boleh dikatakan baik dari segi ekonomi dan efisien, namun masih perlu meningkatkan kinerja dari segi efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fajar Pasca Sarjana Ekonomi Syariah, D., & Sunan Ampel Surabaya STIE Darul Falah Mojokerto, U., 2021. Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1435-1440. <http://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jiedoi>:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>
- Ambat, S., Manossoh, H., Latjandu, L. D., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K., 2022. Analisis Value For Money Pada Kinerja Program Kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Value For Money Analysis on the Performance of Activity Programs at the Regional Finance and Revenue Management Agency o. 6(1), 9–10.
- Andayani W., R. D., 2019. Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Pendekatan Value for Money. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 15–31. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i2.377>
- Ardilla, I., & Putri, A. A. 2015. Financial Performance Analysis Using Value for Money Approach at the Tebing Tinggi District Court. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 78–85. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/428/391>
- Arif, Bachtiar and Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Balabonienė, I., and Večerskienė, G., 2015. The Aspects of Performance Measurement in Public Sector Organization. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 213, 314– 320. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.544>
- Biduri, S. 2018. Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik (Issue 25)*. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1>
- Desky, H., 2019. Penerapan Konsep Time Value of Money dan Kritik Pelaksanaan. *J- ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 1(1), 67–82. <https://doi.org/10.52490/j-iscan.v1i1.696>
- Harindra, I., and Sapari., 2019. Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dalam Perspektif Value for Money. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.

- Haryadi, A., Rokhmawati, A., and Indrawati, N., 2022. Analisis Value for Money Pada Evaluasi Kelayakan Investasi Infrastruktur Publik Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru (Kpbu Spam Kota Pekanbaru). *Jurnal Daya Saing*, 8(3), 369–383. <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v8i3.960>
- Idrus, I. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 57-65.
- Mardiasmo., 2015. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Ömürgönülşen, U., 2002. Performance Measurement in the Public Sector: Rising Concern, Problems in Practice and Prospects. *Cilt*, 20, 99–134.
- Putri, T. Y., & Nasution, A. I. L., 2022. Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Pendekatan Time Value of Money. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 4(1), 77–82. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v4i1.59>
- Riadi, M. 2020. Tujuan , Syarat , Indikator , Model dan Proses. *KajianPustaka*, 1–12.
- Rumagit, I. B. P., Karamoy, H., & Afandi, D., 2022. Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Dinas Pariwisata Kota. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 17(1), 13–22.
- Wahidah, N., & Sudiarti, S., 2022. Value For Money Analysis in Measuring the Realization of the Program of the Regional Development Planning Agency (Bapedda) of Medan City in Review from the Islamic Economy Analisis Value For Money dalam Pengukuran Realisasi Program Badan Perencanaan Pem. 3(2), 405– 410.